

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah di deskripsikan pada bab IV, dalam bagian ini peneliti akan memaparkan simpulan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab I, adapun simpulan dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

- a. Terdapat dua bentuk atau cara dalam upaya kegiatan pengendalian penyimpangan sosial yang dilakukan oleh FPI Cikarang Utara yakni pertama pengendalian penyimpangan sosial dengan cara dakwah dan yang kedua dengan cara hisbah. Pengendalian sosial dalam bentuk dakwah ini lebih bersifat pengendalian persuasif, yakni dengan cara memberikan pemahaman dan nilai-nilai agama terhadap masyarakat untuk menjaga diri agar tidak terjerumus dalam setiap bentuk penyimpangan dan mengajak masyarakat sama-sama peduli terhadap lingkungan sosial agar terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan sosial. Pengendalian sosial dalam bentuk dakwah ini dilakukan oleh FPI Cikarang Utara dengan menyelenggarakan pengajian, tabligh akbar, dan melakukan sosialisasi terkait adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi No 3 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang berisi pelarangan kegiatan usaha diskotik, bar, klub malam, pub, panti pijat, *live* musik, dan jenis-jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama. Sementara kegiatan pengendalian sosial yang dilakukan dalam bentuk hisbah ini lebih bersifat pengendalian koersif, kegiatan pengendalian koersif yakni dalam bentuk monitoring atau kontroling serta melakukan razia tempat-tempat kemaksiatan atau penyimpangan sosial bersama-sama pihak kepolisian.
- b. Kegiatan pengendalian sosial yang dilakukan oleh FPI Cikarang Utara tidak terlepas dari suatu kendala, kendala yang dialami yaitu disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal DPC FPI Cikarang Utara. Kendala yang disebabkan oleh faktor internal yakni minimnya anggaran dana organisasi

Acep Suryanto, 2017

EKSISTENSI ORGANISASI KEAGAMAAN FPI (FRONT PEMBELA ISLAM) DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENYIMPANGAN SOSIAL DI MASYARAKAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang dimiliki oleh FPI Cikarang Utara. Sementara itu kendala yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu masih adanya anggapan negatif masyarakat dan pemberitaan miring dari media sosial terhadap FPI, adanya oknum aparat yang bersifat apriori terhadap kegiatan dan laporan dari FPI, adanya respon aparat pemerintahan maupun aparat penegak hukum yang terkesan lambat dalam menindaklanjuti laporan terkait penyimpangan sosial yang telah dilayangkan oleh FPI Cikarang Utara, dan yang terakhir adanya Lembaga Swadaya Masyarakat dan oknum masyarakat yang melindungi atau menjaga tempat-tempat kemaksiatan.

- c. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh FPI Cikarang Utara dalam upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi yakni untuk meminimalisir anggaran dana dilakukan dengan mengandalkan iuran dari setiap anggota dan juga mengandalkan sumbangan dari para simpatisan FPI Cikarang Utara. Berkaitan dengan masih adanya anggapan negatif terhadap FPI upaya mengatasinya yaitu memberikan pemahaman atau sosialisasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan juga melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial seperti kegiatan sigap tanggap bencana, santunan kepada anak-anak yatim, membagikan zakat fitrah dan juga melakukan pemotongan hewan Qurban, kegiatan bakti sosial lainnya yakni FPI Cikarang Utara mendirikan posko mudik lebaran yang diperuntukan bagi para pemudik yang melintasi wilayah kecamatan Cikarang Utara. Upaya mengatasi respon yang lambat dari aparat, FPI Cikarang Utara melakukan memonitoring dan selalu mengirimkan surat laporan sampai tiga kali, dalam surat laporan terakhir FPI Cikarang Utara memberikan peringatan jika aparat tetap tidak merespon melakukan aksi langsung ditempat dengan tujuan agar pihak Kepolisian dapat merespon cepat dan dapat menindak lanjuti laporan dari FPI Cikarang Utara. Berkaitan dengan kendala adanya provokasi dari oknum masyarakat terkadang FPI Cikarang Utara lebih menyerahkan masalah tersebut kepada aparat yang berwajib dalam hal ini adalah pihak kepolisian.

5.2 Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implikasi terhadap bidang pendidikan sosiologi yakni berkaitan dengan bahan penyampaian materi mata

Acep Suryanto, 2017

EKSISTENSI ORGANISASI KEAGAMAAN FPI (FRONT PEMBELA ISLAM) DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENYIMPANGAN SOSIAL DI MASYARAKAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pelajaran sosiologi yang berkaitan dengan pengendalian sosial dalam bab ragam gejala sosial, karena dalam pembelajaran sosiologi dibutuhkan dan harus disertai dengan bukti serta fakta yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Materi pengendalian sosial terdapat pada bab ragam gejala sosial mata pelajaran sosiologi tingkat SMA kelas X semester genap kurikulum 2013 atau kurikulum nasional pada konsentrasi kelas IIS (Ilmu-ilmu Sosial). Selain itu penelitian ini berimplikasi juga pada materi perkuliahan khususnya dalam mata kuliah sosiologi organisasi bisa dikaitkan dengan materi yang berkaitan dengan pembahasan tujuan dan fungsi organisasi atau juga mengenai pembahasan mengenai struktur organisasi. Selain itu bisa juga diimplikasikan pada mata kuliah penyimpangan sosial, biasanya konsep penyimpangan sosial akan dihubungkan dengan mekanisme pengendalian sosial di masyarakat. Implikasi terhadap masyarakat yakni berkaitan dengan gambaran bentuk dan mekanisme pengendalian sosial yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk dapat mengontrol dan mengurangi bentuk penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat agar kehidupan masyarakat terbebas dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyimpangan sosial. Implikasi terhadap eksistensi organisasi FPI yakni sebagai bahan informasi kepada masyarakat bahwa FPI menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan yang fokus pada kegiatan pengendalian sosial atas banyaknya bentuk penyimpangan sosial di masyarakat, kegiatan pengendalian sosial yang dilakukan FPI berdasarkan pada nilai-nilai agama dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman. Dalam hal ini dibutuhkan juga peranan dari setiap elemen masyarakat terutama organisasi kemasyarakatan yang juga memiliki peran cukup besar dalam melakukan kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat.

5.3 Rekomendasi

Penelitian ini dilakukan agar dapat dapat dijadikan bahan referensi dan bermanfaat bagi berbagai pihak. Berikut ini merupakan rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti yaitu, diantaranya :

5.3.1 Bagi DPC FPI Cikarang Utara

Acep Suryanto, 2017

EKSISTENSI ORGANISASI KEAGAMAAN FPI (FRONT PEMBELA ISLAM) DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENYIMPANGAN SOSIAL DI MASYARAKAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Organisasi FPI Cikarang Utara hendaknya menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya dalam kegiatan pengendalian sosial. Karena dalam penelitian ini, peneliti tidak menjumpai kerja sama yang terjalin antara DPC FPI Cikarang Utara dengan organisasi kemasyarakatan lainnya, dilakukannya kerja sama tersebut bertujuan agar peran sebagai kontrol sosial di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh DPC FPI Cikarang Utara tetapi juga dibantu oleh organisasi kemasyarakatan lainnya.
- b. Koordinasi dan kerja sama yang selama ini dijalin oleh DPC FPI Cikarang Utara dan pihak pemerintahan atau pihak kepolisian senantiasa di tingkatkan dan semakin harmonis agar sistem kontrol sosial di masyarakat dapat berjalan dengan baik.
- c. Terus menjadi organisasi kemasyarakatan yang berada di garda depan dalam melakukan pengendalian atas maraknya bentuk penyimpangan sosial di masyarakat, karena melihat kondisi saat ini begitu banyak kegiatan penyimpangan sosial di masyarakat.

5.3.2 Bagi pemerintah Cikarang Utara dan Polsek Cikarang

- a. Pemerintah Cikarang Utara dan Polsek Cikarang hendaknya sigap tanggap dalam merespon setiap laporan dari elemen masyarakat mengenai adanya bentuk penyimpangan sosial, hal ini dilakukan agar tidak terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah dan pihak kepolisian.
- b. Pemerintah Cikarang Utara dan Polsek Cikarang hendaklah meningkatkan perannya menjadi mitra masyarakat, dengan cara melakukan inisiatif dengan datang langsung ke masyarakat (*door to door*), agar masyarakat tidak segan dan takut untuk melaporkan setiap bentuk penyimpangan sosial Pemerintah Cikarang Utara dan Polsek Cikarang.
- c. Pemerintah Cikarang Utara dan pihak kepolisian hendaknya bisa memberikan apresiasi kepada elemen masyarakat yang aktif membantu dalam kegiatan kontrol sosial di masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat termotivasi untuk dapat melakukan kontrol sosial dalam

rangka membantu peran pemerintah Cikarang Utara dan Pihak kepolisian sebagai lembaga pengendalian sosial formal.

- d. Pemerintah Cikarang Utara dan pihak kepolisian hendaknya mampu untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat yaitu dengan cara Pemerintah Cikarang Utara dan pihak Kepolisian berani untuk menindak secara tegas dan tanpa pandang bulu kepada setiap pelaku penyimpangan sosial, pemilik tempat-tempat yang menjadi sumber penyakit masyarakat karena penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat Cikarang Utara dalam hal ini sangat bertentangan dengan peraturan daerah (perda) yang ada di Kabupaten Bekasi mengenai peraturan penyelenggaraan kepariwisataan No 3 tahun 2016 yang berisi pelarangan kegiatan usaha diskotik, bar, klub malam, pub, panti pijat, live musik, dan jenis-jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama.

5.3.3 Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat hendaknya mampu untuk lebih meningkatkan kerja sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam melakukan kontrol sosial terhadap lingkungan masyarakat.
- b. Masyarakat hendaknya lebih berpartisipasi aktif dalam pengendalian sosial hal ini dilakukan agar kehidupan masyarakat dapat terhindar dari dampak negatif penyimpangan sosial.
- c. Masyarakat hendaknya menghilangkan sifat apatis dan lebih meningkatkan kepedulian terhadap situasi dan kondisi lingkungan yang saat ini marak terjadi penyimpangan sosial.

5.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan rujukan, baik itu dalam aspek-aspek kajian yang lain ataupun untuk menyempurnakan penelitian ini. Keberadaan organisasi FPI di Indonesia sendiri menjadi suatu kajian yang menarik dan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan, karena organisasi FPI merupakan suatu organisasi yang kontroversial dan selalu menjadi perhatian publik, bahkan diakhir tahun

2016 FPI semakin menjadi perhatian publik dan menjadi organisasi yang sering diperbincangkan oleh masyarakat berkaitan dengan kegiatan aksi bela Islam yang dilakukan di Ibu kota Jakarta. Peneliti selanjutnya pun bisa melakukan penelitian mengenai eksistensi FPI di masyarakat dalam aspek sosiologi lainnya seperti dalam aspek sosiologi politik, sosiologi hukum, ataupun sosiologi agama. Selain itu apabila akan melakukan penelitian dengan objek dan tempat penelitian serupa, peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian dengan judul-judul sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap kegiatan pengendalian penyimpangan sosial yang dilakukan oleh FPI dan juga.
2. Efektifitas pengendalian sosial yang dilakukan oleh FPI di masyarakat.
3. Motif dan tujuan masyarakat menjadi anggota organisasi keagamaan FPI.
4. Analisis kegiatan pengendalian sosial yang dilakukan FPI berdasarkan aspek sosiologi hukum.
5. Nilai-nilai toleransi yang dianut oleh FPI dalam kehidupan bermasyarakat.